

DAHLIA SUKMA & BOBBY RAHMAN

PARTISIPASI POLITIK

MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Editor :
Teuku Muzaffarsyah

Kajian di Kabupaten
Aceh Selatan di
Tahun 2013

UNIMAL PRESS

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

(Kajian di Kabupaten Aceh Selatan di Tahun 2013)



universitas
MALIKUSSALEH

**Dahlia Sukma
Bobby Rahman**

**PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
(Kajian di Kabupaten Aceh Selatan di Tahun 2013)**

Editor :
Teuku Muzaffarsyah

UNIMAL PRESS

Judul: **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**, (*Kajian di Kabupaten Aceh Selatan di Tahun 2013*)

viii + 56 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Oktober, 2018

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

Dahlia Sukma

Bobby Rahman

Editor :

Teuku Muzaffarsyah

Perancang Sampul dan

Penata Letak: **Eriyanto**

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN 978-602-464-051-4



ISBN: **978-602-464-051-4**

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Kata Pengantar

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillahirabbilalamin, rasa puji dan syukur kami sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya, terutama rahmat kesehatan, ilmu pengetahuan, kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan Buku ini dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah : Kajian di Kabupaten Aceh Selatan di Tahun 2013”. Tulisan ini merupakan pengembangan dari penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk baru dengan harapan dapat lebih mudah dibaca dan dipahami berbagai kalangan, baik akademisi maupun masyarakat umum.

Kami menyadari bahwa apa yang tertuang dalam karya ini tidaklah sempurna, bahkan masih perlu dikaji lebih lanjut mengingat telah banyak perubahan situasi yang terjadi hingga sekarang. Memang bukan kesempurnaan yang ingin dituju, tapi karya ini lebih merupakan bentuk latihan akademik dalam menganalisis suatu fenomena, sehingga kritik dari para pembaca justru saya harapkan sebagai umpan balik untuk menyempurnakan karya ini dan karya-karya kami di masa mendatang.

Kami ingin menyampaikan terima kasih saya yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian tulisan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Malikussaleh dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh M. Akmal, S.Sos., MA.; teman-teman yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya karya ini.

Lhokseumawe, Oktober 2018

Tim Penulis

This page is intentionally left blank

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	viii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1. Landasan Teoritis.....	3
2.2. Partisipasi Politik.....	3
• Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	5
• Tujuan Partisipasi Politik.....	7
• Tipologi Partisipasi Politik.....	8
• Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat.....	8
2.3. Pemilu.....	9
• Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).....	10
• Tujuan dan Fungsi Pemilukada.....	11
• Perilaku Pemilih	13
2.4. Masyarakat.....	13
BAB III	
METODE PENELITIAN	15
3.1. Lokasi Penelitian	15
3.2. Pendekatan Penelitian.....	15
3.3. Informan Penelitian.....	16
3.4. Sumber Data	16
3.5. Teknik Pengumpulan Data	17
3.6. Teknik Analisis Data.....	17
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
4.1. Hasil Penelitian	19
• Gambaran Umum Lokasi Penelitian	19
• Struktur Organisasi.....	21
• Visi dan Misi Kabupaten Aceh Selatan.....	22
• Partisipasi Masyarakat Dalam Pemungutan Suara Pada Pilkada Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013	23

- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pada Pilkada Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013....34

4.2 Pembahasan	36
• Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemungutan Suara Pada Pilkada Tahun 2013.....	36
• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013.....	37
 BAB V	
PENUTUP	39
5.1 Kesimpulan	39
5.2 Saran	39
 DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43
RIWAYAT PENULIS	51
RIWAYAT EDITOR	55

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Pembagian Luas Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013.....	20
Tabel 4.2 Jumlah penduduk dan jenis kelamin.....	21
Table 4.3 Daftar Pemilih Tetap Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013	31
Table 4.4 Jumlah Yang Menggunakan Hak Memilih Dan Tidak Memilih Dalam DPT	32
Tabel 4.5 Rakapitulasi Data Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008.....	33

•

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah sebagai negara demokrasi yang telah melaksanakan pilkada hingga saat ini dengan berbagai dinamika perpolitikan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada dengan angka golput (golongan putih) yang sering meningkat. Tentu saja itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternalnya. Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan.

Partisipasi politik tersebut merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Apabila masyarakat memiliki partisipasi yang tinggi, maka setiap proses pembangunan politik dan praktik demokratisasi di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Dalam perwujudan demokrasi yang ada ditingkat lokal, salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilukada di daerah-daerah. Sebagaimana pesta demokrasi yang pernah terlaksanakan di daerah Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2013 yang lalu.

Dapat di lihat pada partisipasi masyarakat setempat dalam Pilkada pada beberapa tahun lalu, jumlah pemilih di Kabupaten Aceh Selatan pada pilkada tahun 2013 total orang memilih sebanyak 147.862 jiwa yang tercantum dalam DPT. Pengguna hak pilih 115.063 jiwa, dengan jumlah partisipasi 77,56%. Dengan jumlah perempuan terdiri dari 75.822 jiwa dan laki-laki 72.040 jiwa. Yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 36.629 jiwa terdiri dari laki-laki dan perempuan baik dari kalangan pemuda maupun orangtua. Terdiri dari 6 pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) KIP sebanyak 394 yang tersebar di 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Jumlah pemilih tetap itu mengalami peningkatan pada pilkada Aceh Selatan pada tanggal 25 November 2008 sebanyak 140.195 jiwa yang telah tercantum dalam DPT tersebut, namun yang menggunakan hak pilih dari keseluruhan hanya 99.785 jiwa.

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Kita lihat sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Dapat disadari bahwa reformasi

sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Sebagai proses dari transformasi politik, maka pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin fungsinya mekanisme *check and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah. Masyarakat mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, legitimate, dan peka terhadap kepentingan masyarakatnya sendiri.

Partisipasi politik juga dapat dikatakan sebagai perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pemilu. Masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilihnya, tidak hanya itu partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik bagi warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kini kita tahu bahwa sekarang masyarakat menjadi pelaku atau voter (pemilih) yang akan menentukan terpilihnya Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/wakil Walikota. Sistem pemilu kepala daerah secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat. Sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, floating massa (massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasinya tersebut.

Sebagaimana yang telah terjadi Kabupaten Aceh Selatan pada pilkada tahun 2013 lalu. Masyarakatnya dalam kehidupan sehari-harinya hanya sebagai petani, nelayan serta pekerja swasta maka akan cenderung apatis terhadap dunia perpolitikan yang ada di dunia. Dalam artiannya kesadaran politik mereka itu masih terlihat rendah hanya sebagian dari mereka yang ada ikut serta aktif dalam instansi perpolitikan. Namun, ada juga yang hanya karena mendapatkan uang dari calon baru mau memilihnya. Itu bagi masyarakat yang tidak tahu bagaimana politik yang sesungguhnya. Hal yang demikian, tentu akan berdampak atau berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi masyarakat di dalam pilkada kabupaten Aceh Selatan. •

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

Di dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah, maka landasan teori merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian karena didalam landasan teori akan di muat teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan di teliti. Maka harus digunakan landasan teori, secara umum landasan teori mempunyai tiga fungsi, yaitu :*pertama*, menjelaskan (*explanation*), *kedua*, meramalkan (*prediction*), *ketiga*, pengendalian (*control*) suatu gejala. Sementara itu dalam penelitian kualitatif teori berfungsi untuk memperkuat peneliti sehingga peneliti mempunyai kemampuan untuk menggali informasi secara lengkap, mendalam dan mampu mengkontruksikan temuan-temuannya.

2.2. Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan Politik merupakan berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuannya tersebut. Dapat di pantau partisipasi dari seluruh masyarakat yang memiliki peran yang sangat penting untuk mengarahkan atau memberi masukan setiap politik di suatu daerah. Namun, tidak semua perwujudan demokrasi itu berjalan dengan lancar. Masih banyak juga polemik-polemik mengenai partisipasi masyarakat bawah yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Kecenderungan masyarakat terhadap uang (*money politic*) yang dapat berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya walaupun ia memiliki hak pilih untuk memilih pada proses pilkada berlangsung, yang namun haknya tersebut tidak digunakannya. Sehingga ketika masyarakatnya tidak mempunyai uang, maka golput pun menjadi suara yang mayoritas disetiap pemilihan.

Secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Adapun pengertian dari partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft yaitu partisipasi politik ini sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemerintahan.

Partisipasi politik sangat erat sekali hubungannya dengan kesadaran politik karena semakin sadar bahwa dirinya dipemerintah maka ia akan menuntut hak untuk bersuara kepada pemerintah. Momentum partisipasi masyarakat sangat relevan saat ini, di mana masyarakat sudah dapat memahami perkembangan politik sehingga mereka memiliki rasionalitas dalam mengawasi jalannya pemerintahan dengan stimulasi yang timbul apabila kebijakan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam wahana kebijakan publik. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson memberi tafsiran yang lebih luas, menurut mereka partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, efektif atau tidak efektif.

Namun berbeda dengan Surbakti, ia mengatakan bahwa partisipasi politik pun dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisasi oleh para warga negara untuk memilih pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk kebijakan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan Bersama sebagai suatu bangsa dan negara. Oleh sebab itu maka partisipasi politik masyarakat dalam proses kegiatan pemilu menjadi sangat penting sebab legitimasi hasil pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Terdapat pula faktor-faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu salah satunya yaitu faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut :

- Faktor internal biasanya datang dari dalam diri individu itu sendiri dan orang-orang terdekat disekitarnya yang bahkan mengetahui tentang kehidupan individu tersebut atau suatu kelompok.

- Faktor eksternal biasanya datang dari luar diri individu tersebut. Biasanya faktor ini datang dari kelompok-kelompok kepentingan ataupun tim sukses para calon kandidat yang menjadi peserta dalam kegiatan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah.

- **Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

Karena begitu luasnya cakupan tindakan warga negara biasa dalam menyuarakan aspirasinya, maka dari itu tak heran jika kita lihat bentuk-bentuk partisipasi politik ini banyak beranekaragam. Secara sederhana, Gabriel Almond membagi bentuk partisipasi politik menjadi dua, yakni: *pertama*, partisipasi secara konvensional dimana prosedur dan waktu partisipasinya diketahui public secara pasti oleh semua warga. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk pemberian suara (*voting*), diskusi publik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative. *Kedua*, partisipasi secara *non-konvensional*. Artinya, prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat yang melakukan partisipasi itu sendiri. Dapat dilihat dari tindakan pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), serta perang gerilya dan revolusi.

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut terdiri atas: *pertama*, Kegiatan Pemilih – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislative atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. *Kedua*, *Lobby* – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. *Ketiga*, Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota, maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. *Keempat*, *Contacting* – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. Dan *Kelima*, Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kegiatan fisik manusia atau harta benda, termasuk disini adalah huru-hara, terror,

kudeta, kebutuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individual atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau illegal. Sebab itu, penyusunan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini. Di negara yang menganut paham demokrasi, bentuk partisipasi masyarakat yang paling mudah diukur adalah ketika pemilihan umum berlangsung. Perilaku warga negara yang dapat dihitung identitasnya adalah melalui perhitungan presentase orang yang menggunakan hak pilihnya (*voter turnout*) dibanding dengan warga negara yang berhak memilih seluruhnya.

Bentuk partisipasi yang lain adalah mengikuti suatu rapat umum demonstrasi yang diselenggarakan oleh suatu organisasi politik, atau oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Partisipasi semacam ini bisa bersifat spontan, tetapi sering kali karena diorganisir oleh partai-partai politik atau kelompok-kelompok kepentingan untuk memenuhi agenda politik mereka masing-masing. Dalam agenda kasus ini, orang pada dasarnya berpartisipasi bukan berdasarkan hati nuraninya sendiri melainkan karena dimobilisasi oleh para pejabat politik itu sendiri.

Berbagai-bagai bentuk partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dipakai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Adapun salah satu dari bentuk partisipasi politiknya adalah :

- *Voting* (Pengumutan Suara) dimana ini merupakan alat untuk mengekspresikan dan mengumpulkan pilihan partai atau calon dalam pemilihan dengan cara memilih suara terbanyak.
- *Voting* berfungsi untuk mencari pengurus suatu organisasi atau lainnya yang karena sebelumnya masih seri(seimbang) serta dapat menyelesaikan permasalahan melalui pemungutan suara dan suara terbanyak.
- *Voting* dibagi menjadi dua jenis antara lain sebagai berikut :

- *Voting* Tertutup adalah jenis voting dimana masing-masing pemilih tidak akan bisa mengetahui pilihan orang lain kecuali jika diberitahu secara langsung oleh orang tersebut. Keuntungan dari *Voting* ini ialah terjaganya kerahasiaan pilihan setiap orang sehingga ia dapat lebih bebas menyatakan pilihannya tanpa tekanan dari pihak manapun. Kerugiannya ialah kita tidak akan bisa melihat preferensi pilihan dari para pemilih. Pilihan dari para pemilih hanya bisa diketahui setelah proses perhitungan suara selesai.
- *Voting* Terbuka adalah dimana pemilih memiliki kesempatan untuk melihat hasil pilihan orang lain secara langsung. Keuntungan dari ini setiap orang dapat melihat siapa saja yang mendukung dan siapa saja yang menolak dalam suatu *Voting*. Kekurangannya dapat dilihat karena seseorang berpeluang tidak bisa memberikan pendapatnya secara jernih.

• Tujuan Partisipasi Politik

Indonesia sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat, konsep partisipasi politik ini sangat tepat diterapkan. Latar belakang lahirnya konsep demokrasi musyawarah dalam partisipasi politik sendiri karena terdorong oleh tingginya tingkat apatisisme politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 50%-60%). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan mengkhawatirkan banyak pemikir Barat yang pada akhirnya mengeluarkan konsep demokrasi musyawarah agar warga mau ikut terlibat atau berpartisipasi dalam proses politik. Adapun tujuan dari partisipasi politik sebagai berikut :

- Memberikan kesempatan pada setiap warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.
- Untuk mengontrol pemerintahan yang akan terpilih.
- Sebagai alat untuk memilih pemimpin dan mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok yang mempengaruhi pemerintah dengan jalan terlibat dalam politik.
- Sebagai alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara-negara yang pemerintahannya otoriter.
- Membantu meringankan beban pemerintah, seperti terbukannya lapangan kerja baru sebagai pengawas jalannya pemberian suara (*voting*) yang dilakukan suka rela.
- Untuk melegitimasi rezim dan kebijakan rezim pemerintah.

• **Tipologi Partisipasi Politik**

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin dapat membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni :

- Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- Partisipasi politik spektor, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- Partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- Partisipasi politik pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apayang dicita-citakan sehingga lebih menjerus kedalam partisipasi politik yang apatis. Pemberian suara dalam pilbup merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikandalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain.

• **Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat**

Adapun yang menjadi faktor mempengaruhi partisipasi politik masyarakat yaitu sebagai berikut :

- **Faktor Sosial Ekonomi Dan Politik**

Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah keluarga. Sedangkan faktor politik menurut Arnstein S.R, peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi: *Pertama*, komunikasi politik – adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara actual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika. *Kedua*, Kesadaran politik – menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap

lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan pembangunan. *Ketiga*, pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil

- Faktor Fisik Individu Dan Lingkungan

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya.

- Faktor Nilai Budaya

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, nilai budaya politik atau *civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakikatnya adalah politik baik etika politik maupun Teknik atau peradapan masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

2.3. Pemilu

Pemilu merupakan pesta demokrasi terbesar dalam suatu negara dan sebagai transformasi demokrasi yang sangat elegan dalam berpolitik saat ini. Pelaksanaan pilkada merupakan wujud demokrasi suatu negara dalam memilih kepala dan wakil-wakil rakyat diberbagai daerah yang diberi amanah oleh masyarakat untuk memperjuangkan segala aspirasi demi tercapainya kebaikan Bersama. Pemilu merupakan suatu kompetisi yang diikuti oleh partai-partai politik dalam menentukan calon-calon kepala daerah ditingkat daerahnya masing-masing, namun iklim pilkada tahun 2013 di Aceh sangat berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Pilkada di Aceh selain partai-partai nasional yang bersaing, partai politik lokal juga ikut berkompetisi untuk merebut hati rakyat.

Menurut Sumego dalam Rahman, pemilihan umum disebut juga dengan "*Political Market*" adalah pasar politik tempat individu tau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media masa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk,

pamphlet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan eksekutif maupun legislative. Sedangkan menurut Rahman. Pemilihan umum adalah salah satu pola rekrutmen politik yang khusus dilakukan bagi setiap warga negara yang memiliki hak politik (*political right*) serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Jadi penulis dapat berasumsi bahwa pemilu tersebut merupakan sebuah bentuk dari partisipasi masyarakat selaku negara yang berdemokrasi besar untuk memberikan peluang bagi setiap masyarakatnya serta memiliki hak pilih bebas dalam memilih calon kepala daerah guna untuk menjalankan seluruh aspirasi rakyatnya agar tercipta kesejahteraan bersama di dalam sebuah negara.

• **Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)**

Di era orde baru sebelum bergulirnya reformasi dalam UUD 1945 sebelum diamandemen pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Namun, setelah era reformasi, UUD 1945 diamandemen sehingga pada pasal 1 ayat (2) ini menjadi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Hal ini mengandung makna bahwa kedaulatan tidak lagi sepenuhnya berada ditangan MPR tetapi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka kepala daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah sehingga pemerintahan yang terbentuk merupakan cerminan dari kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya di daerah. Pilkada juga merupakan sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seperti halnya negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya orde baru.

Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat dengan bebas menyalurkan pendapatnya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang pada masa orde baru sangat dibatasi. Kelahiran pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia.

• **Tujuan dan Fungsi Pemilukada**

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah (pemilukada) secara langsung. Pemilukada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan penguatan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah.

Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

- Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak Bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan wujudkan kehendak masyarakat di daerah.
- Melalui pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- Pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan control secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Melalui pemilukada masyarakat di daerah dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat seorang Kepala Daerah, juga apakah organisasi politik penopang masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pemilu, pemilukada harus dilaksanakan secara demokratis sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Pelanggaran dan kelemahan yang dapat menyesatkan esensi demokrasi dalam pemilukada harus diperbaiki dan dicegah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 JO Perppu Nomor 1 Tahun 2014 JO Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 JO Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung antara lain:

- Mekanisme dan prosedur pemilihan. Mekanisme ini meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari penjurian bakal calon, pencalonan dan pemilihannya. Keterlibatan lembaga legislatif dan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut diatur jelas dan tegas.
- Peranan DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah. Dominasi peranan DPRD dalam Pemilihan Kepala Daerah seperti saat ini, tentu saja akan mengalami degradasi. Peranan DPRD tidak mengurangi fungsinya sebagai lembaga legislatif di daerah.
- Mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah. Perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD.
- Hubungan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan Presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD. Dalam satu Tahun, di suatu Kabupaten/ Kota, mungkin terjadi tiga kali pemilihan, yaitu Pemilu (Presiden, DPR, DPRD), pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/ Walikota.

Tujuan dari pemilihan umum dikutip dari pendapat Prof. Solly Lubis bahwa memandang pemilihan umum dari segi ketatanegaraan merupakan salah satu jalan penting untuk mengakhiri situasi temporer dalam ketatanegaraan, termasuk di bidang perlengkapan negara itu. Konsekuensi logisnya, dengan berhasilnya pemilihan umum, diharapkan badan-badan perlengkapan negara yang lama diganti dengan badan-badan negara sebagai produk pemilihan umum. 54 Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan Pasal 1 UUD 1945, Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksudkan di sini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilihan umum dalam waktu tertentu. Karenanya pemilihan umum adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan:

- Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dimilikinya.
- Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam jabatan pemerintahan sebagai wakil yang dipercayakan oleh pemilihnya.

• Perilaku Pemilih

Dapat di lihat pada umumnya perilaku politik yang ditentukan oleh faktor internal dan individu itu sendiri seperti idealism, tingkat kecerdasan, kehendak hati. Serta ditentukan juga oleh factor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Perilaku politik ini menurut Sudiono Sastroatmodjo mengatakan bahwa perilaku politik adalah perilaku yang menyangkut persoalan politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta system kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut. perilaku politik yang ditujukan oleh individu merupakan hasil pengaruh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal, yang berkaitan dengan sosial budaya maupun lingkungan alamnya.

Oleh karena itu perilaku politik adalah suatu tindakan masyarakat atau pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan atau pencapaian tujuan terkait keputusan politik baik dalam proses pembuatan maupun dalam pelaksanaannya. Sebagai insan politik setiap warga negara tentunya melakukan tindakan politik, yang dalam penelitian ini difokuskan pada perilaku pemilih yang juga merupakan bagian dari perilaku politik.

Sementara itu perilaku pemilih dalam hal ini diartikan oleh J. Kristiadi sebagai suatu keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan psikologis, sosiologis, dan rasionalitas si pemilih yang di sebut sebagai teori *Voting Behaviour*. Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa perilaku adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang terbentuk dari perwujudan suatu sikap. Maka disimpulkan bahwa perilaku pemilih merupakan sejauh mana seseorang untuk bertindak atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan politik, dalam hal ini yaitu penggunaan suara pada suatu pemilihan umum (pemilu). Perilaku pemilih ini timbul dari isu-isu dan kebijakan politik yang menjadi faktor seseorang mamiliki pilihan politik yang berbeda satu sama lainnya. Yang dapat mempengaruhi suatu pemilihan itu ditentukan oleh adanya faktor internal maupun faktor eksternal pada setiap masyarakat tertentu.

2.4. Masyarakat

Konsep tentang masyarakat pasti sering kita dengar, seperti : masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat Betawi, masyarakat

Jawa, dan lain-lain. Meskipun secara mudah bisa diartikan bahwa masyarakat itu berarti warga namun pada dasarnya konsep masyarakat itu sendiri sangatlah abstrak dan sulit ditangkap.

Istilah masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *society*. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas. Ada beberapa definisi tentang masyarakat menurut para ahli :

Menurut Peter. L. Berger, masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Menurut Emile Durkheim, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Menurut Marx, masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan ekonomis, baik produksi maupun konsumsi, yang berasal dari kekuatan-kekuatan produksi ekonomis, yakni teknik dan karya. Menurut Harold J. Laski, masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan berkerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka Bersama. Sedangkan menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu system adat istiadat tertentu.

Kata dari masyarakat itu sebenarnya memiliki pengertian sekumpulan manusia yang disatukan oleh aturan atau adat istiadat tertentu, didalamnya juga terdapat struktur dan pembagian kerja atau tugas, baik yang sudah jelas seperti yang dijumpai pada struktur masyarakat tradisional, pedesaan maupun masyarakat modern perkotaan. Menurut Soemardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan, jadi dari pengertian ini, unsur-unsur masyarakat adalah sebagai berikut: (1) Manusia yang hidup Bersama. (2) Bercampur untuk waktu yang lama. (3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan kesatuan.

•

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan. Alasan memilih di Aceh Selatan sebagai lokasi penelitian karena secara geografis memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian, selain itu penetapan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pilkada partisipasinya terus meningkat namun masih ada juga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara menyeluruh dalam pilkada di Aceh Selatan. Sehingga, penulis mendapatkan gambaran yang utuh mengenai partisipasi politik masyarakat.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian deskriptif mengenai kata-kata lisan ataupun tulisan, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti, pendekatan ini langsung diarahkan pada individu-individu dan kelompok masyarakat dimana mereka berada secara *holistic* dan tidak mereduksi aspek dengan mengisolasi aspek tertentu. Pendekatan ini melihat aspek penelitian sebagai bagian dari keseluruhan gejala yang diamati.

Hasil dari penelitian digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian ini. Pendekatan kualitatif akan memberikan kemudahan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian ilmu sosial yang identic dengan analisis dan juga disebabkan oleh obyek yang diteliti bersifat dinamis, yaitu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan.

Penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata acara yang berlaku dalam situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan dan proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena. Dalam penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian yang digunakan untuk pengambilan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk kata-kata dan

penjelasan yang menggambarkan keadaan atau suatu kondisi lapangan, proses, tingkah laku dan peristiwa tertentu.

Analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam permasalahan yang menjadi fokus penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran komperhensif dan mendalam tentang partisipasi politik masyarakat terhadap pilkada di Aceh Selatan.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian dikenal dengan informan yang merupakan orang-orang yang dapat memberi informasi atau data yang terkait dengan masalah dan fokus penelitian yang akan di kaji oleh peneliti. Pemanfaatan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relative singkat banyak informan yang terjangkau. Jadi, sampling internal, karena informan di manfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

3.4. Sumber Data

Moleong menyatakan bahwa dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sedangkan data tertulis berupa dokumen sebagai data pendukung dalam penyelidikan ini.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- **Data Primer**
Data primer yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terkait. Mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada narasumber, informan dan beberapa pihak terkait lainnya, setelah dilakukan wawancara maka akan disusun pembahasan secara berurutan.
- **Data Sekunder**
Data sekunder adalah data-data penunjang dalam penelitian ini, yaitu yang bersumber dari buku-buku atau tulisan, seperti : Website, Undang-undang, Jurnal maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan penulisan ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperjelas data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- Wawancara
Dalam hal ini peneliti menggunakan Teknik wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan dari informan untuk memperoleh data yang tidak tertulis dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur berdasarkan sampling acak. Sumber -sumber informan yang direncanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - Ketua KIP Kabupaten Aceh selatan.
 - Anggota KIP Kabupaten Aceh Selatan
 - Kesbang Pol Linmas Di Kabupaten Aceh selatan
 - Anggota DPRK Aceh Selatan.
 - LSM di Kabupaten Aceh Selatan
 - Geuchik dan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.
- Dokumentasi
Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer dengan mengumpulkan data dari dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat kabupaten Aceh selatan terhadap pilkada tahun 2013 yang berupa dokumen, arsip, Qanun, peraturan daerah atau informasi lainnya di internet yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis lakukan terhadap data yang diperoleh yaitu bersifat deskriptif, yaitu menganalisa data sesuai dengan kandungan isinya yang berisi informasi faktual yang menggambarkan segala sesuatu apa adanya. Terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk dapat memperoleh gambaran atau suatu kesimpulan atas fakta yang diamati, juga bersifat deduktif yaitu suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan teori yang sebenarnya telah diterima secara umum sebagai dasar kebenaran dan keadilan, yang diambil suatu kesimpulan terhadap fakta yang diamati.

- Pengumpulan adalah usaha yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang dianggap relevan dengan judul dalam penelitian ini membentuk dokumen-dokumen ataupun arsip dan keterangan narasumber.
- Mereduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga memerlukan pencatatan secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu di rangkum dan di pilih hal-hal yang pokok dan penting. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentan hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
- Verifikasi data (penafsiran ulang) dan kesimpulan, adalah dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan. Sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif, penerikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap. Pertama, menarik kesimpulan sementara, namun seiring bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembali data yang telah ada. Kemudian, verifikasi data juga dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dari pihak-pihak lain yang ada keterkaitannya dengan penelitian, yaitu dengan meminta pertimbangan dari sumber-sumber lain, atau dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber tertentu dengan sumber-sumber lain. Akhirnya peneliti menarik kesimpulan akhir untuk mengungkapkan temuan-temuan penelitian ini.

•

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Dalam tata pemerintahan tentu adanya aktor yang ikut serta dalam menjalankan proses politik termasuk dalam penyelenggaraan pilkada yang ada di Indonesia. Untuk itu, dengan adanya partisipasi politik memberikan ruang yang luas pada saat pemilu itu tiba. Partisipasi dalam proses pemilu sangat menentukan suatu kepentingan pemimpin, proses tersebut dapat di lihat pada saat pemungutan suara dimana masyarakat yang ikut berpartisipasi dan melibatkan dirinya dalam perpolitikan yang semakin menggugah pada era global saat ini. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pilkada di Kabupaten Aceh Selatan, dapat dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis analisis sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan.

• Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat – Selatan dengan ibukota Kabupaten adalah Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.176,58 Km² atau 417.658 Ha, yang meliputi daratan utama di pesisir Barat – Selatan Provinsi Aceh. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000, wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 02° 23' 24" – 03° 44' 24" LU dan 96° 57' 36" – 97° 56' 24" BT. Kabupaten Aceh Selatan yang dikelilingan dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Tenggara.
- Sebelah Timur : Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia.
- Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat Daya.

Secara Topologi wilayah Kabupaten Aceh Selatan mempunyai kemiringan yang dapat dikatagorikan sangat curam/terjal (63,45%) dan hanya 34,66% berupa dataran. Penyebaran kemiringan lahan lahan di Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut (1) 138.894,44 hektar (kemiringan 0 – 3%) ; (2) 507.35 hektar

(kemiringan 3 – 8%) ; (3) 175.04 hektar (kemiringan 8 – 15%) ; (4) 6.388.86 hektar (kemiringan 15 – 25%).

Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi pemerintahan terbagi atas 18 (delapan belas) wilayah kecamatan, 43 Mukim dan 248 Gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang telah membagi wilayah administrasi pemerintahan/kota di Aceh berturut-turut atas Kecamatan, Mukim dan Gampong.

Tabel 4.1
Pembagian Luas Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah	
				Mukim	Gampong
1.	Trumon timur	Krueng luas	28.715,12	1	8
2.	Trumon tengah	Lading rimba	12.350,22	2	10
3.	Trumon	Trumon	76.679,87	2	12
4.	Bakongan Timur	Pasie Seubadeh	7.384,38	1	7
5.	Kota Bahagia	Bukit Gading	24.463,29	2	10
6.	Bakongan	Bakongan	5.761,51	2	5
7.	Kluet Selatan	Suak Bakong	10.798,63	3	17
8.	Kluet Timur	Paya Dapur	45.795,28	2	7
9.	Kluet Tengah	Koto Menggamat	79.089,22	1	13
10.	Kluet Utara	Kotafajar	7.310,59	3	19
11.	Pasieraja	Kampung Baru	9.811,39	2	20
12.	Tapaktuan	Tapaktuan	10.070,36	2	15
13.	Samadua	Samadua	10.571,19	4	28
14.	Sawang	Sawang	19.657,08	4	15
15.	Meukek	Kota Buloh	46.506,19	4	22
16.	Labuhanhaji Timur	Tengah Peulumat	8.970,16	2	11
17.	Labuhanhaji Barat	Labuhanhaji	6.068,27	3	16
18.	Labuhanhaji	Blang Keujeren	7.656,10	3	13

Tabel 4.2
Jumlah penduduk dan jenis kelamin

Kecamatan	Laki-laki/ Male	Perempuan/ Female	Jumlah
Trumon Timur	3.487	3.504	6.991
Trumon Tengah	2.735	2.713	5.448
Trumon	2.166	2.094	4.260
Bakongan Timur	2.627	2.613	5.240
Kota Bahagia	3.111	3.140	6.251
Bakongan	2.384	2.546	4.930
Kluet Selatan	6.203	6.449	12.652
Kluet Timur	4.690	4.781	9.471
Kluet Tengah	3.086	3.074	6.160
Kluet Utara	10.997	11.362	22.359
Pasieraja	7.874	7.887	15.761
Tapaktuan	11.051	11.888	22.939
Samadua	7.280	7.597	14.877
Sawang	7.008	7.080	14.088
Meukek	9.130	9.478	18.608
Labuhan Haji Timur	4.737	4.859	9.596
Labuhan Haji Barat	7.850	7.934	15.784
Labuhan Haji	6.032	6.555	12.587
Total	102.448	105.554	208.002

• **Struktur Organisasi**

Organisasi merupakan suatu wadah bagi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, organisasi juga merupakan suatu system dari aktivitas kerjasama antara dua orang atau lebih, maka dari itu diperlukannya pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang lebih baik. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, hal yang paling utama untuk menentukan langkah awal dalam organisasi adalah dengan membentuk struktur organisasi dimana merupakan kerangka yang berfungsi untuk menyamakan setiap gerak langkah pada semua pilar atau departemen yang terkait didalamnya dan isinya mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja agar setiap unsur mengerti akan tugas-tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi di lingkungan pembangunan Kabupaten Aceh Selatan dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Struktur organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Pemerintahan Kecamatan.

Dalam hal ketatalaksanaannya, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang murah, mudah, cepat, sederhana, transparan, terjangkau dan memiliki kepastian hukum. Atas dasar semangat otonomi daerah dan tuntutan masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program-program pemberdayaan aparatur dan organisasi pemerintah, diantaranya program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

• **Visi dan Misi Kabupaten Aceh Selatan**

• **Visi**

visi pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan adalah “Mewujudkan masyarakat Aceh Selatan yang adil, makmur, sejahtera, madani, serta cerdas dan bebas dari KKN melalui pemerintahan yang menganut nilai demokrasi yang efektif, efisien serta partisipatif”.

• **Misi**

- Menerapkan pelaksanaan syariat islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat Aceh Selatan sehari-hari.
- Pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada sektor pertanian, kelautan, perkebunan dan peternakan, serta koperasi.
- Meningkatkan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal pada masyarakat dan aparatur pemerintah.
- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- Membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang berkembangnya perekonomian masyarakat.
- Menciptakan lapangan usaha serta lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran. Serta
- Menerapkan sistem transparansi dalam penyusunan perencanaan APBD serta bebas KKN.

• **Partisipasi Masyarakat Dalam Pemungutan Suara Pada Pilkada Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013**

Kita tahu bahwa di seluruh Indonesia selalu melaksanakan pilkada setiap lima tahun sekali. Khususnya di Aceh yang merupakan proses demokratisasi terutama bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Selatan yang ingin menentukan suatu perubahan di masa yang akan datang. Yaitu perubahan dalam sistem politik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara keseluruhan bukan hanya sepihak saja. Melalui penyelenggaraan pilkada serentak ini yang jatuh pada tanggal 26 Januari 2013 lalu. Masyarakat Aceh ingin menentukan masa depannya kearah yang lebih bagus, siapa pun pemimpin yang akan memimpin daerahnya tersebut. Pada pilkada di Kabupaten Aceh Selatan secara umum berjalan dengan lancar, selain di dukung oleh partai nasional, ada juga partai lokal yang ikut bersaing pada pilkada waktu itu. Dari hasil wawancara penulis dengan ketua KIP Aceh Selatan, ia mengatakan bahwa :

“... Dalam penyelenggaraan pemilukada Tahun 2013 Saya selaku ketua lembaga independen di Kabupaten Aceh Selatan bekerja berdasarkan undang-undang serta mnjaga prinsip dalam penyelenggaraannya di lapangan tanpa ada intimidasi yang bararti yaitu pelanggaran pada saat berkampanye, kami juga dapat memantau proses yang telah di rencanakan, agar dapat terciptanya pilkada yang baik, baik itu dari keamanan maupun panitia pelaksana pilkada, setiap masyarakat kami daftar kan ke dalam DPT bagi yang sudah memenuhi syarat untuk memilih. Pada pemungutan suara bisa kita lihat bahwa partisipasinya sudah mulai ada walaupun masih belum menyuluruh, semoga pemilu kedepan lebih dari pada pilkada tahun 2013 di kabupaten Aceh Selatan”.

Jelas dikatakan oleh Ketua bahwa setiap penyeenggaraan pemilu selalu terjaga dan tertib, dengan kerjasama dengan TPS-TPS maupun panitia di kecamatan tanpa adanya cekcok antara satu dengan yang lainnya, jika pada saat pemilihan ada yang tidak mendapat surat suara berarti mereka berada di luar daerah karena pihak panitia seluruh nya telah mendaftarkan dalam DPT nya. KIP juga telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan adanya dukungan dari semua pihak terutama dengan kesadaran masyarakat untuk menyukkseskan pemilukada tersebut berjalan dengan adil dan jujur serta profesionalitas anggota KIP dalam menjalankan tugasnya dilapangan tanpa ada hal yang dapat merusak pesta demokrasi tersebut. Bukan kesalahan dari panitia jika mereka tidak ikut serta dalam pemilihan walaupun mereka ingin sekali berpartisipasi.

Penulis juga telah mewawancarai penyelenggara pemilukada Kabupaten Aceh Selatan anggota KIP Edi Syahputra, ia mengatakan bahwa :

“... pada saat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak itu di gelar di seluruh kota/daerah yang ada di Indonesia, Aceh selatan tepat nya tahun 2013 telah menyelenggarakan pilkada seluruh prosesnya telah dilaksanakan dan keputusan hukum pun telah final dalam menetapkan kandidat yang akan mengikuti pilkada tersebut. demikian dengan RPJMN itu target pemilih adalah 77,5 % dan berlaku umum untuk seluruh pemilih yang ada dikabupaten aceh selatan, namun walaupun pada tahun 2013 jumpah pemilih nya hanya tercapai tingkat 70% , upaya dari kami pun sudah semakin maksimal dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2013. Namn ,walau nanti banyak juga masyarakat yang tidak ikut serta dalam memilih itu kembali ke masyarakatnya kaerna kami hanya mengajak agar menjadi warga yang baik tanpa adanya golput.”

Dari penjelasan diatas tersebut jelas dikatakan bahwa setiap pemilih tersebut agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pilihannya, sebagai penyelenggara pasti ingin mewujudkan yang terbaik agar penyelenggaraan pemilukada pada tahun 2013 dapat memenhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional sehingga dapat dikatakan bahwa para komisi independen pemilihan sudah berkapasitas dalam penyelenggarannya tersebut. dengan tidak adanya golput maka tingkat partisipasi dari masyarakat itu sendiri sudah bisa memenuhi harapan dan target pemilihan dari komisi Independen pemilihan. Walaupun ada sebagian masyarakat yang cuek saja akan proses pilkada itu sendiri.

Sejauh ini kami sebagai penyelenggara pemilu, baik pada pemilukada maupun pemilihan wakil rakyat dan pemimpin Negara, sudah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi, termasuk pada menetapkan Panwaslu, PPK, PPS sampai Menerbitkan panduan bagi petugas KPPS (kelompok panitia pemungutan suara). Kami juga melakukan sosialisasi bukan hanya di perkotaan namun sampai ke kampung atau desa-desa yang ada di seluruh kabupaten aceh selatan walaupun tidak meyuluruh dalam memberikan arahan kepada setiap masyarakatnya tersebut. apalagi masyarakat yang masih berada diperkampungan yang masih membutuhkan arahan yang baik agar tidak terjerat dalam permainan politik yang digunakan oleh setiap paslon untuk memilih nya tanpa masyarakat melihat terlebih dahulu tentang *background* dari calon-calon kepala daerahnya. Karena dalam sosialisasi itu dilakukan agar terhindar dari politik-poitik yang

mengakibatkan suatu kejahatan, dibalik itu ada pengawas pemilu atau pemilukada yang menangani proses dari kinerja para panitia pelaksana pemilukada itu sendiri. Seperti yang telah penulis wawancarai Panwaslu Kecamatan Kluet Utara Muhammad Fadly Hidayat, ia mengatakan bahwa :

“... kami selaku panitia pengawas pemilu di kecamatan ini hanya bertugas untuk mengawasi proses dari penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, setiap ada yang melakukan suatu hal yang dapat melanggar hukum pemilu maka akan kami tindak lanjut agar terciptanya pemilu yang baik. Dan juga terhindar dari terdinya praktik politik uang di sekitar wilayah kecamatan, serta mengawasi segala hal yang berhubungan dengan pemilu di kecamatan tersebut sebagai mana yang telah di tetapkan dalam undang-undang di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Selatan dengan adanya kerjasama tim yang sinkron tanpa berpihak kemanapun”.

Dalam penjelasan diatas jelas dikatakan bahwa selaku pengawasan pada pemilu dapat berkerjasama dengan panitia pelaksana pemilukada agar terciptanya pemilukada yang baik, dengan kata lain panwas yang di bawah penyelenggara pemilu tersebut dapat melihat apa bagaimana tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan termasuk dalam pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh setiap paslon tersebut. dan mengawasi juga kotak suara yang masih tersegel rapi yang akan diserahkan kepada penyelenggara pemilu yaitu KIP atau KPU. Penulis juga telah mewawancarai staf kasubag data KIP Marlina, ia mengatakan bahwa :

“... Pada data yang sudah ada pada pemilukada Tahun 2008 lalu sudah meningkat daftar pemilihnya sekitar 20 % walaupun angka tersebut belum memenuhi kapasitas atau ketentuan pemilihan yang sesungguhnya. Kami sebagai bagian data yang kami terima dari panitia pemilihan melalui panwas ataupun pemilihan kecamatan. Data tersebut yang kami publikasikan, tanpa adanya data manipulasi, karena esuai hasil rekapitulasi data yang di berikan oleh panitia pelaksana pemilukada”.

Dari paparan tersebut jelas dikatakan bahwa dengan adanya kerja yang baik antara KIP dengan para pengawas pemilukada dapat membawa pilkada yang santun, tanpa ada yang berpihak kemanapun, selaku panwas ataupun panitia itu sudah menjadi kewajiban agar tidak memihak kemana pun, harus netrral bukan berarti netra untuk tidak menggunakan hak pilih, namun dapat menggunakan hak pilih tapi tidak terlibat dalam bentuk partai

apapun. Agar tidak memicu suatu permasalahan pada saat pemilukada itu berlangsung. Serta terciptanya pemilukada yang damai.

Jadi dengan adanya sosialisai kepada masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara dapat melaksanakan pemilu yang santun, walaupun ada masyarakat yang masih mengikut-ikutan dalam proses pemilihannya, seperti yang penulis wawancarai T. Zulhelmi selaku Ketua DPRK, ia mengatakan bahwa :

“... saya sebagai wakil rakyat juga melihat proses pemilukada pada tahun 2013 yang diselenggarakan oleh para komisi independen pemilihan sangatlah baik, itu karena adanya kerjasama yang terkontrol dari paniti-pantianya sehingga masyarakat ramai dan melaksanakan dengan tertib dan aman, saya pribadi juga melihat partisipasi masyarakat juga semakin meningkat walau pun ada sebagian yang harus terlibat dengan *money politic* dalam waktu pemilihannya. Saya juga sebagai dewan untuk rakyat, sangat apresiasi terhadap partisipasinya dalam pemilukada, saya lihat banyak di TPS-TPS masyarakat nya sangat antusias dalam pemberian suara di tempat masing-masing.”

Dari paparan tersebut, telah dikatakan bahwa partisipasi masyarakat itu ada, walaupun mereka yang memilih karena sesuatu, namun mereka telah mengikuti proses politik dengan cara apapun demi tercukupi segala kebutuhan, dengan adanya mereka yang telah ikut partisipasi dalam proses politik dapat menyukkseskan pemilukada di daerah masing-masing.

Masyarakat sangat bersemangat dan berbondong-bondong dalam memberikan hak suaranya untuk para kandidat pilkada. Keterlibatan langsung di munculkan oleh masyarakat sangat besar demi mensukkseskan pilkada pada tahun 2013 di Kabupaten Aceh Selatan pada saat itu. Seperti yang pernah penulis wawancara Geusyik Gampong Krueng Batee Kecamatan Kluet Utara Darmi Ilma, ia mengatakan bahwa :

“...Pada proses demokrasi yang telah berlangsung dengan baik membuat masyarakat sangat santai dan nyaman untuk dapat berpartisipasi politik pada pilkada 2013, masyarakatnya pun sangat antusias dalam melakukan pencoblosan di TPS-TPS yang telah disediakan oleh Panitia Penyelenggara pilkada, serta msasyarakat pun untuk mengantri agar dapat memberikan hak suaranya selara langsung dalam memilih pemimpinnya yag baik, dan disini masyarakat mulai menunjukkan dirinya dalam berpartisipasi politik dan ikut menyukkseskan pesta demokrasi tersebut dengan tenang serta aman”.

Dari penjelasan diatas jelas dikatakan bahwa proses demokrasi yang telah di jalani dengan begitu baik serta msyarakatnya telah menunjukkan partisipasi atau keikutsertaannya dalam dunia perpolitikan yang tinggi ini pada pilkada 2013 yang dilakukan dengan pemilihan langsung dan sangat efisien. Dalam partisipasi politik pada saat pilkada masyarakat sangat antusias untuk memberikan hak suaranya ke TPS dalam memilih pemimpin yang akuntabel, kreatif dan inovatif, seiring dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan, masyarakat pun mengikuti proses dengan aman dan tertib. Tidak ada ditemukan hal-hal yang membuat kericuhan pada saat pencontrengan berlangsung. Penulis juga sempat mewawancarai dengan tokoh masyarakat Kecamatan Samadua Baizillah, ia mengatakan bahwa :

“... partisipasi masyarakat pada saat pilkada sangat tinggi, setiap pelaksanaan pilkada lima tahun sekali selalu mengalami kenaikan yang hebat seperti pada tahun 2008 dulu, masyarakat nya sangat bersemangat menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam melakukan pencoblosan walaupun harus mengantri sampai sore hari nya , apalagi ibu-ibu yang rela mengantri demi memilih calon kepala daerah yang lebih baik kedepannya”.

Dari paparan di atas jelas di menunjukkan bahwa masyarakat yang ikut partisipasi dalam memberikan hak suaranya pada pilkada 2013 lalu sangatlah bagus, karena dengan adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dapat membawa dampak yang lebih baik kedepan. Dengan keseriusan masyarakat dalam mensukseskannya pilkada tersebut walaupun dilema dalam memilih siapa calon pemimpin yang berkriteria dan mampu mensejahterakan rakyatnya sendiri. Dan dapat membuat suatu program-program yang bermanfaat bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Penulis juga mewawancarai Cut Ridwan sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Pasie Raja, beliau menyatakan :

“... Dari pilkada yang sebelumnya dilaksanakan sangat berbeda dengan perkembangan partisipasi poltik pada pilkada tahun 2013 dimana masyarakat nya lebih bersemangat untuk mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam melakukan pencontrengan walaupun nanti ada suatu kepentingan yang membuat masyarakat memberikan hak suaranya pada saat pencoblosan di laksanakan. Dan disini masyarakat juga menyadari bahwa mereka lebih mayoritas memilih dari partai lokal karena telah membawa suatu perubahan pasca konflik yang telah berkepanjangan khususnya di Aceh ini”.

Penjelasan dari wawancara diatas jelas dikatakan bahwa tingginya partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2013 ini merupakan suatu tanggung jawab dari masyarakat dalam menentukan pilihannya dan untuk mencapai apa yang di harapkan oleh rakyatnya, walaupun dulu Aceh mengalami konflik yang sangat banyak memakan korban dari berbagai kalangan, dan banyak juga kehilangan harta dan martabat orang Aceh. Maka dari itu semangat masyarakat dalam melakukan pencoblosan pada saat pilkada adanya persepsi bahwa partai lokal akan membawa dampak yang positif terhadap masyarakatnya sendiri. Namun, persepsi itu hanya ada dalam pikiran masyarakat awam yang belum terlibat aktif dalam dunia politik yang sesungguhnya. Hal yang berbeda diutarakan oleh salah satu warga lain, Penulis telah mewawancarai seorang warga di Kecamatan Bakongan, Muksin beliau mengatakan :

“... walaupun ada partai lokal tetap sama saja tidak ada yang dapat di lakukannya pada saat ia memimpin. Saya setiap ada nya diselenggarakan pesta demokrasi apapun bentuknya baik itu pilkada, pileg, dan pilpres saya memberikan setiap hak suara serta mengikuti setiap aktivitas politiknya karena merupakan sebagai warga Negara yang baik yang mempergunakan hak suara dengan baik. Namun, kalau untuk berharap suatu perubahan yang baik tidaklah mungkin, sekarang bisa para calon mengemukakan setiap janjinya, tapi berbeda setelah calon menjadi seorang pemimpin, maka ia akan teringat terhadap kelompok-kelompok yang dulu membantunya dan lupa akan masyarakat yang terus berteriak dalam rimba Tuhan tersebut”.

Dari paparan diatas jelas di dikatakan bahwa bukan karena adanya partai lokal yang dapat membawa suatu perubahan melainkan kerja dari seorang pemimpin itu sendiri yang ingin membuat suatu perubahan kepada rakyat-rakyatnya. Melainkan masyarakat ini memilih dengan kemauannya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak-pihak tertentu. Penulis sempat mewawancarai ssalah warga masyarakat Gampong Kandang Kecamatan Kluet Selatan Pardidik, beliau mengatakan :

“.... Partisipasi masyarakat pada pilkada (pemilihan kepala daerah) tahun 2013 sudah menunjukkan suatu yang elegan dalam berpartisipasi politiknya. Dari sekian ribu warga yang termasuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) hanya beberapa persen warga yang tergolong dalam golongan putih (golput) dengan berbagai macam alasan yang mereka utarakan. Dengan tingginya partisipasi masyarakat dapat merubah suatu perubahan pada saat pesta demokrasi tersebut dilaksanakan”.

Dari hasil wawancara diatas jelas dikatakan bahwa tingginya partisipasi masyarakat pada saat pilkada 2013 tidak lepas dari kesadaran masyarakat nya sendiri yang telah melibatkan diri dalam perpolitikan dengan memahami setiap perkembangan politik yang ada, namun hanya orang-orang tertentu yang belum mengetahui dunia politik karena berfikir kalau politik itu kotor. Dan tidak minat dalam bersosialisasi politik yang ada di Kabupaten aceh Selatan pada pilkada tahun 2013 dahulu. Penulis telah mewawancarai Geusyik Gampong Kotafajar Kecamatan Kluet Utara Surya Dharma, beliau mengatakan :

“... pada saat pilkada berlangsung masyarakat sekitar sangat antusias dalam melakukan pencontrengan di TPS-TPS terdekat tanpa adanya keributan yang brutal, dengan keamanan yang terjaga sehingga dapat terlaksana pilkada yang aman dan damai karena sosialisasi yang tinggi dari masyarakatnya tersebut”.

Dari paparan hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa dengan tingginya partisipasi politik masyarakat yang sangat antusias dalam menyuskeskannya pilkada pada tahun 2013 tanpa dipengaruhi oleh hal-hal apapun, masyarakat terus memberikan hak suara mereka masing-masing saat berada dalam TPS-TPS yang ada disekitar wilayah mereka itu, dengan adanya kerjasama yang baik antara pelaksana dengan keamanan saat proses pilkada berlangsung dengan sangat baik dan tertib.

Pilkada yang telah dilaksanakan di kabupaten aceh selatan pada tahun 2013 berjalan dengan sangat lah baik, setiap para calonnya berlomba-lomba untuk mendapat kan satu kursi di pemerintahan. Dalam proses pemungutan suara segala persiapan telah disiapkan oleh para anggota yang disebut KPPS. Begitu juga dengan warga yang memiliki hak pilih datang ketempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan. Mereka kemudian mencoblos atau mencontreng kertas suara dan kemudian memasukkan ke dalam kotak suaranya. Seperti wawancara penulis dengan Irfan selaku Sekretariat PPS Kecamatan Tapaktuan mengutarakan :

“... pada saat pemilihan berlangsung, selaku panitia pemilihan segala perlengkapan telah di sediakan sampai proses pemungutan suara di pantau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Karena banyak terjadi kesalahan pada pencoblosan mendapat suara yang double atau ganda pada saat pemilihan. Jadi banyak suara yang rusak, sehingga waktu perhitungan suara menjadi seri (seimbang) sehingga kami harus melakukan pemungutan suara dan suara terbanyak untuk dapat menentukan pemenang dalam pilkada tersebut”.

Dari paparan diatas jelas dikatakan bahwa pada setiap pemungutan suara harus adanya penkontrolan yang bagus agar masyarakat tidak memberi hak pilih yang berlebihan pada saat pencoblosan berlangsung di TPS-TPS manapun. Dengan memberikan arahan terlebih dahulu sebelum pencontrengan hak suara setiap masyarakat tersebut. penulis juga telah melakukan wawancara dengan warga Kecamatan Kluet Tengah Erni, ia mengatakan bahwa :

“... saya pada saat pemilu selalu mengikuti proses dan ikut serta dalam memilih, karena bagi saya pemilihan itu adalah suatu hak selaku warga indonesia yang baik dapat menggunakan hak pilih dengan baik pula, walaupun ada yang tidak saya pahami mengenai politik, baik itu kepentingan sesama ataupun kepentingn sendiri mereka, yang penting saya telah menggukan hak pilihnya namun tidak dengan paksaan melainkan dengan hati nurani, dengan harapan bisa menjadi pemimpin yang lebih inovatif dan peduli rakyat nya”.

Dari paparan diatas jelas dikatakan bahwa selaku warga Negara yang baik dapat mempergunakan hak pilih sebaik-baiknya tanpa harus adanya intimidasi dari para kandidat tersebut. berarti mereka mengetahui tentang pemilihan hanya aja mereka enggan melibatkan dirinya karena berfikir itu hanya akan buang-buang waktu saja, walaupun mereka memilih siapa saja itu tidak mempengaruhi mereka dapat berkehidupan yang layak, hanya saja mereka berharap untuk selalu dekat dengan rakyat-rakyatnya.

Table 4.3
Daftar Pemilih Tetap Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Gampog	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		L+P
				L	P	
1.	Trumon Timur	8	13	2.281	2.240	4.521
2.	Trumon Tengah	10	11	1.797	1.816	3.613
3.	Trumon	12	13	1.362	1.449	2.811
4.	Bakongan Timur	7	11	1.822	1.874	3.696
5.	Kota Bahagia	10	14	1.984	2.060	4.044
6.	Bakongan	5	9	1.678	1.834	3.512
7.	Kluet Selatan	17	25	4.212	4.527	8.739
8.	Kluet Timur	7	15	3.011	3.261	6.272
9.	Kluet Tengah	13	14	2.311	2.325	4.636
10.	Kluet Utara	19	38	8.156	8.500	16.656
11.	Pasieraja	20	29	5.380	5.623	11.003
12.	Tapaktuan	15	36	7.154	7.937	15.091
13.	Samadua	28	33	5.333	5.834	11.167
14.	Sawang	15	28	5.145	5.275	10.420
15.	Meukek	22	35	7.013	7.480	14.493
16.	Labuhan Haji Timur	11	17	3.512	3.535	7.047
17.	Labuhan Haji Barat	13	29	5.642	5.703	11.345
18.	Labuhan Haji	16	25	4.247	4.549	8.796
	Total	248	395	72.040	75.822	147.862

Sumber : KIP Aceh Selatan.

Table 4.4
Jumlah Yang Menggunakan Hak Memilih Dan Tidak Memilih
Dalam DPT

No	Kecamatan	Jumlah Hak memilih		Jumlah Hak Tidak Memilih	
		L	P	L	P
1.	Trumon Timur	1.675	1.635	578	633
2.	Trumon Tengah	1.486	1.466	309	347
3.	Trumon	1.140	1.157	222	292
4.	Bakongan Timur	1.363	1.390	459	484
5.	Kota Bahagia	1.493	1.629	473	449
6.	Bakongan	1.335	1.397	343	437
7.	Kluet Selatan	3.280	3.670	932	857
8.	Kluet Timur	2.168	2.327	846	931
9.	Kluet Tengah	1.920	1.824	391	501
10.	Kluet Utara	6.014	6.176	2.132	2.334
11.	Pasieraja	3.972	4.067	1.408	1.556
12.	Tapaktuan	5.674	6.330	1.480	1.608
13.	Samadua	4.442	5.014	891	820
14.	Sawang	4.346	4.420	811	843
15.	Meukek	5.722	6.159	1.291	1.321
16.	Labuhan Haji Timur	2.396	2.860	1.116	675
17.	Labuhan Haji Barat	3.930	4.550	1.712	1.153
18.	Labuhan Haji	3.044	3.592	1.203	957
Total		115.063		32.795	

Sumber : KIP Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013.

Dari hasil yang diperoleh dari kantor komisi independen pemilihan (KIP) di Kabupaten Aceh Selatan adalah jumlah dari yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada tahun 2013. Dengan rekapitulasi hasil perolehan pemilih pada pilkada 2013 yang meningkat dari tahun sebelumnya yang selisih antara 20 % pada pilkada tahun 2008. Dimana wilayah yang paling dominan perolehan suara ialah Kluet Utara. Dapat dilihat yang menggunakan hak pilih sudah meningkat dari pada yang tidak memilih walaupun tingkatannya masih sangat rendah dari pada orang yang menggunakan hak pilih tersebut. adapun perbandingan perolehan suara pada tahun 2008 adalah sebanyak 140.195 jiwa yang terdaftar dalam DPT pemilukada sedangkan yang telah menggunakan hak pilih sebanyak 99.785 jiwa, selebihnya tidak menggunakan hak suaranya

dikarenakan suatu hal yang membuat ia tidak memilih pada saat pemilukada tersebut berlangsung. Adapun rekapitulasi suara tahun 2008 ialah :

Tabel 4.5 Rakapitulasi Data Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008

No	Nama kecamatan	Jumlah pemilih			Jumlah TPS
		L	P	L+P	
1..	Labuhanhaji Barat	5.309	5.462	10.771	27
2.	Labuhanhaji	4.172	4.630	8.802	25
3.	Labuhanhaji Timur	3.516	3.580	7.096	18
4.	Meukek	6.586	7.168	13.754	40
5.	Sawang	4.718	5.053	9.771	28
6.	Samadua	4.926	5.577	10.503	35
7.	Tapaktuan	7.738	8.872	16.610	40
8.	Pasie Raja	4.684	5.185	9.869	32
9.	Kluet Utara	7.455	7.927	15.382	39
10.	Kluet Tengah	1.949	2.083	4.032	14
11.	Kluet Timur	2.849	3.147	5.996	15
12.	Kluet Selatan	3.918	4.310	8.228	25
13.	Bakongan	3.194	3.543	6.737	23
14.	Bakongan Timur	1.612	1.702	3.314	10
15.	Trumon	1.705	1.774	3.479	17
16.	Trumon Timur	2.821	3.030	5.851	20
	Jumlah	67.152	73.043	140.195	408

Jelas terlihat dari hasil penelitian bahwa tingkat partisipasi masyarakat meningkat setiap penyelenggaraan pemilu tersebut, dengan perbandingan yang cukup signifikan, itu dikarenakan masyarakat sudah mengetahui politik dan tidak membuat ia cuek akan hal-hal politiknya, dengan bertambahnya pemilih pada pemilukada itu berarti KIP selaku penyelenggaraan pemilukada sudah menunjukkan bahwa mereka bias bekerja dengan baik. Sehingga masyarakat mau melibatkan diri dalam memberikan hak suara maupun dalam perpolitikan walaupun tidak menyeluruh. Dapat dilihat pada haun 2008 itu presentase pemilihan hanya 45 % sedangkan pada pemilukada tahun 2013 sampai 56% dari jumlah data masyarakat yang menggunakan hak pilih tersebut di Kabupaten Aceh Selatan. berarti dapat disimpulkan bahwa selesih antara nya hanya 11% dari sebelumnya. Dilihat dengan hasil perincian

perolehan suara pemilukada pada tahun 2013 yang di sampaikan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut :

- Hasmar Yulia – Mudasir : 2.246 suara (2,02%).
- M. Saleh – Ridwan A Rachman : 22.411 suara (20,15%)
- Teuku Sama Indra – Kamarsyah : 33.810 suara (30,39%)
- Darisman – Khaidir : 14.281 suara (12,83%)
- M Natsir – Zulkifli : 23.819 suara (21,41%)
- Wahyu M Waly Putra – Irawan : 14.706 suara (13,22%)

Adapun pasangan yang menjadi pemimpin di Kabupaten Aceh Selatan terpilih yaitu pasangan Teuku Sama Indra – Kamarsyah yang di usung oleh koalisi empat partai politik (parpol) yakni PAN, Demokrat, PKPB, PPRN.

• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pada Pilkada Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013

Partisipasi politik masyarakat tak lepas dari faktor-faktor yang membuat masyarakat terlibat dalam politik, partisipasi masyarakat pada pilkada memang sangat berhubungan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Dapat dilihat dari beberapa sisi baik itu melihat langsung visi misi kandidat dengan menilai sendiri atau pun berupa acuan yang di gunakan untuk memilih kandidat yang telah memberikan uang kepada masyarakat agar terpilih kandidat tersebut. hasil wawancara penulis dengan warga kecamatan Trumon Sity Hajar , ia mengatakan bahwa :

“...Pada saat pemilihan saya tidak ikut memilih, karena banyak hal yang saya amati dapat menghambat masyarakat untuk tidak terlibat dalam proses politik baik itu pemilu, karena masyarakat disini masih sangat awam tentang politik, jadi pada saat diselenggarakannya pemilu baik itu pilkada dan sebagainya ,masyarakat tersebut harus diberikan sesuatu atau imbalan dari kandidat yang ingin terpilih. Mengingat masyarakatnya yang sangat bermasalah dalam kehidupan terutama dalam perkembangan ekonomi.”

Mencermati segala fenomena yang terjadi pada saat pilkada berlangsung, partisipasi masyarakat sangat lah tinggi namun kesadaran dari diri sendiri belum begitu maksimal karena masih beranggapan bahwa setiap pemilihan harus dimbalkan dengan segala sesuatu untuk menggunakan hak pilihnya tersebut, berarti jelas

bahwa masih adanya kepentingan-kepentingan tertentu antara masyarakat dengan kandidat pada pilkada tahun 2013.

Oleh karena itu dalam proses penyelenggaraan pemilu harus adanya sosialisasi yang mendalam serta dapat memberi arahan yang bagus bagi masyarakat yang belum mengerti mengenai politik. Walaupun telah dibuat berbagai hal oleh penyelenggaraan pemilu yang terkait untuk menumbuhkan rasa kesadaran politik bagi mereka dan memiliki inisiatif untuk mengikuti pemilu pada tahun 2013. Golput menjadi pilihan mereka yang tidak ingin meberikan hak suaranya tersebut. masyarakat tentunya mempunyai argumentasi tentang faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk tidak memilih.seperti yang dikatakan oleh Hayaton Wardani dan Khadijah warga kecamatan Kluet Timur :

“... melihat pemilihan umum ini saya sudah tidak berminat lagi untuk berpartisipasi mengingat kepemimpinan yang dahulu tidak sesuai dengan harapan para masyarakat, hanya janji-janji yang di utarakan bukan di realisasikan kepada rakyatnya yang berharap suatu perubahan yang baik demi kemajuan daerah biar tidak jadi daerah yang tertinggal khususnya di Aceh”.

Dari paparan diatas jelas dikatakan bahwa masih ada juga masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan yang tidak memilih dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2013 di sebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang membuat masyarakat kecewa akan pemerintahan sebelumnya yang telah membuat mereka terbuai akan janji-janji yang pernah dilontarkan oleh para paslonnya pada saat berkampanye untuk mencapai keinginan tersebut. dan itu membuat masyarakat enggan untuk ikut partisipasi lagi dalam pemilihan umum apapun. Seperti yang penulis juga Wawancara Pemuda Desa Kotafajar Halim Syah, ia mengatakan bahwa :

“... Saya selaku masyarakat biasa melihat penyelenggaraan pemilukada pada Tahun 2013 sangat lah ramai dan melaksanakan dengan pilkada aman serta damai, saya lihat partisipasi juga semakin meningkat walaupun banyak faktor yang mendorong mereka untuk mengikuti proses pemilihan dengan mengharapkan sesuatu dari setiap paslonnya untuk memilih dirinya”.

Dari paparan yang di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat itu ada, walaupun mereka mengikuti proses politik dengan cara apapun untuk memenuhi segala kebutuhannya, dengan adanya partisipasinya dalam pemilihan mereka mendapat suatu keuntungan dari paslon yang akan dipilih pada saat pemilihan. Tanpa memikir selama

jabatan pemimpin nya selama lima tahun kedepan. Dari faktor-faktor tersebut masyarakat belum begitu memahami bagaimana proses politik yang ada di seluruh Indonesia ini khusus nya Aceh, harus adanya suatu faktor pendorong agar dapat menggunakan hak suaranya walaupun hanya sebagian namun tidak menyuluh .

4.2 Pembahasan

• Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemungutan Suara Pada Pilkada Tahun 2013

Pilkada di Aceh secara umum berjalan dengan sangat lancar jujur dan adil serta nuansa demokrasi yang sangat elegan tanpa adanya intimidasi maupun pemaksaan terhadap masyarakat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melakukan penconcrengan atau pun pencoblosan. Tingginya partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2013 di Kabupaten Aceh Selatan umumnya di pengaruhi oleh *money politik* yang semakin merajalela di setiap pemilihan. Beragam cara di pergunakan oleh paslon untuk memenangkan dirinya. Apalagi pilkada di Aceh lebih di pengaruhi oleh partai Aceh sendiri, dimana PA itu merupakan salah satu partai lokal (parlok) yang dipelopori oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tidak lain adalah para pejuang elit politik dimasa konflik yang menjelma di Aceh hampir 30 Tahun dan berakhir pada tahun 2005 dalam penandatanganan MoU perdamaian antara RI dengan GAM di Helsinki Finlandia serta di monitoring oleh CMI (*Crisis Management Initiative*) yang diketuai oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtisari melalui proses politik yang demokratis sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat khususnya di Aceh Selatan. Setelah perdamaian terwujud di keranakan banyak hal-hal yang terjadi pada masa konflik seperti yang pernah kita rasakan Tsunami besar yang pernah melanda Aceh, dengan itu banyak perubahan yang datang pada masyarakat Aceh tersebut. Ini sesuai dengan teori elit politik yang juga di kembangkan oleh Huntington dan Nelson menyatakan bahwa di dalam setiap masyarakat, sikap elit politik terhadap partisipasi politik mungkin merupakan suatu faktor tunggal yang paling efektif dalam mempengaruhi sifat partisipasi politik di masyarakat itu. Partisipasi yang di mobilisasikan hanya akan terjadi apabila kaum elit politik berupaya untuk melibatkan masyarakat nya dalam kegiatan perpolitikan. Partisipasi yang otonom hanya terjadi dengan biaya yang layak apabila kaum elit politik mendorongnya , mengizinkannya, atau tidak bersedia untuk menindasnya. Dalam hal

ini jelas teori tersebut menguatkan akan partisipasi politik masyarakat terhadap pilkada pada tanggal 26 januari 2013 di Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam pemungutan suara masyarakat sangat aktif dan antusias dalam meyukseskan pilkada tersebut dengan baik dan tertib sampai pelaksanaan pemilu itu selesai. Dengan demikian, dapat penulis analisis bahwa partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara dalam pilkada tahun 2013 semakin meningkat tanpa ada suatu hal yang merusak atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses penyelenggaraan pemilu tersebut. semakin terjadi perubahan kedepan semakin sadar masyarakat terhadap politik dalam menentukan pemimpin yang layak untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya sendiri.

• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013

Partisipasi politik merupakan salah satu aktivitas yang tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor penting dalam partisipasi politik masyarakatnya. Masyarakat ingin memilih pemimpinnya sesuai dengan kriteria tanpa ada pendorong untuk memaksa masyarakat untuk memilihnya berdasarkan isu-isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya tersebut terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi juga aktif serta memiliki kehendak bebas.

Dalam pemberian suara nya dalam pilbud merupakan salah satu wujud partisipasi politik yang terbiasa. Bagi masyarakat kegiatan seperti ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat walaupun masih ada masyarakat yang tidak ingin untuk mengetahui politik ini. Namun demikian, partisipasi politik masyarakat tersebut walaupun belum menyeluruh dalam memberikan hak suara nya sudah dikatakan meningkat dari tahun sebelumnya.

Penulis juga berasumsi bahwa yang menjadi faktor mereka dalam pemilihan itu karena ekonomi, lingkungan maupun nilai budaya yang membuat mereka terintimidasi dalam menentukan pilihannya :

- Faktor ekonomi merupakan sebagian dari mereka yang ikut merujuk pada program-program yang diusung oleh calon untuk dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi pilihan pemilih di suatu tempat agar dapat memilih calon tersebut,

seperti pada saat ia membagi-bagi uang dalam berkampanye agar memilih pasangan calonnya. Namun, jika masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan yang mengerti akan politik maka ia hanya menginginkan suatu perubahan yang lebih maju dan calon yang dipilih adalah yang paling dinilai bisa memajukan daerahnya.

- Faktor Lingkungan yaitu dimana para calon dapat mempengaruhi satu masyarakat dengan masyarakat lainnya baik itu dari semua benda maupun keadaannya, seperti ada masyarakat yang mengajak teman nya agar tidak memilih pasangan tersebut dikarenakan hal-hal tertentu. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki pemahaman politik pun mengikuti apa yang diarahkan temannya.
- Faktor Nilai Budaya dalam hal ini sangat berpengaruh bagi masyarakat setempat. Dimana budaya dan kearifan lokal ini bersifat membujuk, sehingga ada nya serangkaian tindakan komunikasi yang memiliki urgensi untuk meyakinkan sejumlah besar khalayak. Pengaruhnya para kandidat dapat berusaha membentuk citra yang sesuai dengan culture masyarakatnya. Dengan adanya nilai-nilai budaya yang baik akan menentukan para pemilih yang baik pula.

Maka dari itu para masyarakat harus memilih dengan kesadaran yang penuh tanpa ada pihak-pihak yang mendorong mereka agar dapat menentukan pilihan. Dimana partisipasi politik merupakan suatu kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara maupun pemimpin daerah, secara langsung untuk mempengaruhi suatu kebijakan dalam pemerintahan. Dan kegiatan ini mencakup pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum beserta kelompok lain sebagainya. Sebagai masyarakat biasa banyak faktor yang mempengaruhi ia dalam partisipasi pada pemilukada. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap dari bentuk-bentuk partisipasi yang ada.

•

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara pada saat pilkada (pemilihan kepala daerah) tahun 2013 partisipasi politik masyarakatnya sangat lah antusias dalam menyuksekkannya pesta demokrasi, serta telah berjalan dengan sangat baik, jujur, adil dan terkendali dalam kontek demokratisasinya. Khususnya pilkada yang diselenggarakan di Kabupaten Aceh Selatan yang terlaksana dengan aman dan tertib, demikian masyarakat yang berada di wilayah sekitar telah memberikan hak suara atau hak pilih politik untuk menentukan masa depan daerah tersebut ke arah yang lebih baik dan maju serta mengurangi masyarakat yang pengangguran dimana-mana dengan membuka lowongan pekerjaan yang seluas-luasnya demi tercipta nya masyarakat sejahtera.
2. Selain Partisipasi masyarakat juga ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat pada saat pilkada tersebut di selenggarakan mulai dari pendaftarn para calon sampai hari pemilihan masyarakat dengan senang hati melibatkan diri dalam upaya menyuksekk pilkada yang aman sampai pemilihan pun masyarakat berbondong-bondong ke TPS guna melakukan pencontrengan dengan memberikan hak-hak suara politik terhadap calon-calon kepala daerah atau bupatinya.

5.2 Saran

Dari paparan hasil penelitian yang telah penulis analisis, maka penulis mempunyai beberapa saran dari hasil karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut :

- Kepada KIP Untuk pilkada yang selanjutnya yang akan jatuh pada tahun ini agar lebih mampu dalam menjalankan tugasnya pada saat paslon berkampanye demi kesejahteraan masyarakatnya. Serta bagi paslon jangan hanya menggunakan kesempatan tersebut demi kelompok maupun individu. Serta

dapat menumbuhkan rasa sosialisasi terhadap masyarakatnya agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara semakin tinggi setiap pemilihannya. Karena dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat sekitar dapat lebih terbuka dalam mengeluarkan kebijakan yang di buat oleh pemerintahan yang telah ditetapkan oleh rakyatnya sendiri, demi tercapainya manfaat secara keseluruhan serta dapat juga memberdayakan SDA (sumber daya manusia) yang begitu melimpah di daerah Kabupaten Aceh Selatan sendiri agar mampu membuat suatu produk sendiri.

- Penyelenggara pilkada juga harus bekerja semaksimal mungkin demi terciptanya pilkada yang aman dan damai tanpa adanya faktor yang membatasi masyarakat untuk berpartisipasi, dan buat masyarakat tersebut sadar akan politik murni tanpa harus adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang membuat masyarakat terpengaruhi akan hal-hal tersebut.

•

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Prasetyo. Bambang dan Jannah. Lina Miftahul. 2005. *Metode Penelitian kualitatif :Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryadi Budi. 2007. *Sosiologi Politik*. Sejarah. Defenisi dan Perkembangan Konsep. Yogyakarta: IRCISOD.
- Ranchman. MM. 2011. *Sistem Politik Indonesia*. Pusat Pengembangan bahan ajar-UMB.
- H.I.A.Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Huntington P Samuel. dan Nelson Joan. 1990. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Janedri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Kontpress. Jakarta.
- May. T. Rudy. 2007. *Pengantar Ilm Politik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Michael Rush dan Philip Althoft. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja.
- Moleong. Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Pawito. 2007 *Penelitian komunikasi kualitatif*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Surbakti Ramlan. 1999. *Memahami Gramedia. Ilmu Politik*. Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1954*. Jakarta.

Jurnal

- Syaiful Huda. *partisipasi politik masyarakat dalam pemilukada 2012 Kabupaten Pati (studi kasus Tegalharjo kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*. Diakses 20 September 2017.
- Irawati (2010). *Factor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan nigari (suatu kajian dalam kebijakan program dana alokasi umum nigari di kenagarian panyakalan kecamatan kubung kabupaten solok provinsi*

sumatera barat). Jurnal penelitian. www.peernet.com. Diakses Tanggal 24 Oktober 2017.

Ferri Nicholas Hamisi (2013). *Partisipasi Politik dalam Pembuatan Kebijakan*. Jurnal Penelitian.

Internet

<http://diliputnew.com/2012/11/17/daftar-pemilih-sementara-aceh-selatan/> Diakses tanggal 15 November 2017.

[http://aceh.tribunnews.com/2013/01/30/pilkada-aceh-selatan-dan-partai-aceh/di akses 10 Agustus 2017](http://aceh.tribunnews.com/2013/01/30/pilkada-aceh-selatan-dan-partai-aceh/di%20akses%2010%20Agustus%202017).

www.definisimenurutparaahli.com/pemungutan-suara-voting/pengertian.

Pengertian dan Definisi Masyarakat Menurut Para Ahli - Definisi - CARApedia.htm. Diakses Tanggal 24 Oktober 2017.

R. Rizal Hilman, 2008, *Political Development*, <http://www.wordpress.com>. Diakses tanggal 25 Oktober 2017.

Skripsi

Usman (2010). *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Aceh Timur*. Skripsi. Universitas Malikussaleh

Jamaluddin (2015). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam mempengaruhi Kebijakan Public Di Kota Lhokseumawe*. Skripsi. Universitas malikussaleh.

Dokumentasi

BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013.

•

LAMPIRAN



**CATATAN PELAKSANAAN BENEFITASI HASIL PENGHITUNGAN SKARA PEMBERIAN INJUM
DI KABUPATEN KEPATIHAN, KABUPATEN SELATAN TAHUN 2021-2022**
DI TINGKAT KABUPATEN

KABUPATEN
PESISIR SELATAN

KABUPATEN
SELATAN

No	URAIAN	KELOMPOK												Jumlah Pemberian				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	1. Anak usia 0-12 bulan - Ibu hamil - Ibu menyusui	3.845	4.187	2.312	2.852	2.145	3.233	2.234	3.139	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136
2	2. Anak usia 1-5 tahun - Anak usia 1-5 tahun	3.752	3.145	3.131	2.489	2.275	3.234	2.857	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253
3	3. Anak usia 6-12 tahun - Anak usia 6-12 tahun	11.245	8.796	7.847	14.893	18.439	11.427	15.891	11.883	11.883	11.883	11.883	11.883	11.883	11.883	11.883	11.883	11.883
4	4. Anak usia 13-17 tahun - Anak usia 13-17 tahun	2.930	3.244	2.396	3.727	4.248	4.842	3.254	3.973	3.973	3.973	3.973	3.973	3.973	3.973	3.973	3.973	3.973
5	5. Anak usia 18-24 tahun - Anak usia 18-24 tahun	4.539	2.037	2.165	4.159	4.628	3.217	4.718	4.867	4.867	4.867	4.867	4.867	4.867	4.867	4.867	4.867	4.867
6	6. Anak usia 25-34 tahun - Anak usia 25-34 tahun	4.489	4.436	4.258	11.285	8.756	9.458	11.884	8.829	8.829	8.829	8.829	8.829	8.829	8.829	8.829	8.829	8.829
7	7. Anak usia 35-44 tahun - Anak usia 35-44 tahun	1.213	1.283	1.116	1.296	811	891	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
8	8. Anak usia 45-54 tahun - Anak usia 45-54 tahun	1.153	937	879	1.211	815	828	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
9	9. Anak usia 55-64 tahun - Anak usia 55-64 tahun	2.265	3.248	1.791	2.812	1.454	1.711	3.889	2.564	2.564	2.564	2.564	2.564	2.564	2.564	2.564	2.564	2.564
10	10. Anak usia 65-74 tahun - Anak usia 65-74 tahun	1	2	1	8	8	8	18	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

TANDA TANGAN MARGOTUS BENDI PENGHITUNGAN PEMBERIAN KELOMPOK KELOMPOK

(Handwritten signature)

TANDA TANGAN SAKIT PARANGI SAKIT PARANGI

(Handwritten signature)

B. SURvei TERBUKA

No.	URAIAN	Jumlah Pembahasan	Alasan Tinggi	Alasan Rendah	Kelebihan	Kekurangan	Kelebihan Tinggi	Kelebihan Rendah	Frekuensi Tinggi	Frekuensi Rendah	Skor Neto
1		2	1	1	1	1	1	1	11	11	0
2	SIKAP TERBUKA	3.905	144	205	46	179	124	97	100	112	3.903

C. SURvei SAHIB HATI TERBUKA

No.	URAIAN	Jumlah Pembahasan	Alasan Tinggi	Alasan Rendah	Kelebihan	Kekurangan	Kelebihan Tinggi	Kelebihan Rendah	Frekuensi Tinggi	Frekuensi Rendah	Skor Neto
1		1	1	0	0	0	1	0	11	0	11
2	SIKAP TERBUKA SAHIB HATI TERBUKA	86.894	4.283	6.950	2.744	3.122	2.757	2.222	2.962	3.111	115.166

Catatan: Untuk melihat hasil dan persentase dapat dilihat di bagian lain. Untuk melihat alasan yang tinggi, rendah dan neto dapat dilihat di bagian lain. Untuk melihat alasan yang tinggi, rendah dan neto dapat dilihat di bagian lain.

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Alamat Kantor	Alamat Rumah	Alamat Kantor	Alamat Rumah
1	HERMAN SUDIRMAN	Wakil Ketua DPRD
2	HERMAN SUDIRMAN	Wakil Ketua DPRD
3	HERMAN SUDIRMAN	Wakil Ketua DPRD
4	HERMAN SUDIRMAN	Wakil Ketua DPRD

No.	Nama	Alamat	Alamat Kantor	Alamat Rumah	Alamat Kantor	Alamat Rumah
1	HERMAN SUDIRMAN	Wakil Ketua DPRD
2	HERMAN SUDIRMAN	Wakil Ketua DPRD
3	HERMAN SUDIRMAN	Wakil Ketua DPRD
4	HERMAN SUDIRMAN	Wakil Ketua DPRD
5	HERMAN SUDIRMAN	Wakil Ketua DPRD
6	HERMAN SUDIRMAN	Wakil Ketua DPRD

REKOR TERBUKA

No	KEBAYAN	Lembaga/Barang	Alamat/Tempat	Lama/Tempat	Tempat	Demang	Sejumlah	Perhitungan	Poin/Slip	Robot/Time	Robot/Tempat	Jumlah/Barang
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	PERUSAHAAN GAS	2006	620	114	250	190	226	257	209	208	78	2.000

REKOR SAH ZAR TIDAK SAH

No	REKOR SAH	Lembaga/Barang	Alamat/Tempat	Lama/Tempat	Tempat	Demang	Sejumlah	Perhitungan	Poin/Slip	Robot/Time	Robot/Tempat	Jumlah/Barang
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	PERUSAHAAN GAS	5.001	6.330	5.237	11.205	8.700	9.656	12.019	8.665	12.193	5.748	86.000

Catatan

1. Apabila terdapat keluhan/jamuan/masalah dalam hal ini, silakan hubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini atau datang langsung ke kantor Dinas Pemilihan Kabupaten Kutai Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini.

No	Nama	Jabatan	Alamat/Tempat
1	DR. H. H. H. H. H.	Ketua	...
2	DR. H. H. H. H. H.	Wakil Ketua	...
3	DR. H. H. H. H. H.	Anggota	...
4	DR. H. H. H. H. H.	Anggota	...

No	Nama	Alamat/Tempat	Tempat
1	DR. H. H. H. H. H.
2	DR. H. H. H. H. H.
3	DR. H. H. H. H. H.
4	DR. H. H. H. H. H.

No	Nama Pemasangan Biosk Bupati Nama Bupati	Pembelian Hewan Untuk Pasangan Calon NAMA PASANGAN CALON BUPATI WAKIL BUPATI										Jumlah Bioteknologi
		Lamborghini Biar	Lamborghini F1	Lamborghini F1	Lamborghini F1	Lamborghini F1	Lamborghini F1	Lamborghini F1	Lamborghini F1	Lamborghini F1	Lamborghini F1	
1	HUMAIR VILIX, S.Pd dan MELINDA, S.Kom diwakili oleh M. SAIFUL KHAN	48	21	20	18	47	144	225	1.815	201	45	1.824
2	Dr. H. ERDAN A. RAHMAT, M.Pd diwakili oleh Dr. H. ERDAN A. RAHMAT, M.Pd	265	267	247	519	661	1.231	3.415	1.999	4.812	857	14.573
3	Dr. H. ERDAN A. RAHMAT, M.Pd diwakili oleh Dr. H. ERDAN A. RAHMAT, M.Pd	2.344	1.656	1.672	8.251	2.918	3.985	5.217	1.872	2.563	834	28.658
4	Dr. H. ERDAN A. RAHMAT, M.Pd diwakili oleh Dr. H. ERDAN A. RAHMAT, M.Pd	221	854	189	149	1.122	1.798	3.066	546	889	243	8.877
5	Dr. H. ERDAN A. RAHMAT, M.Pd diwakili oleh Dr. H. ERDAN A. RAHMAT, M.Pd	832	564	1.238	2.451	3.094	2.208	1.836	1.482	3.299	1.323	17.209
6	Dr. H. ERDAN A. RAHMAT, M.Pd diwakili oleh Dr. H. ERDAN A. RAHMAT, M.Pd	4.465	2.840	1.585	271	227	882	763	853	871	281	12.987
Jumlah keseluruhan												83.389

NAMA PASANGAN BIODIPLOMATA NAMA BIODIPLOMATA		NAMA PASANGAN CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI	
Dr. H. ERDAN A. RAHMAT, M.Pd diwakili oleh Dr. H. ERDAN A. RAHMAT, M.Pd		Dr. H. ERDAN A. RAHMAT, M.Pd diwakili oleh Dr. H. ERDAN A. RAHMAT, M.Pd	

No	Uraian	Lebaran/ Bulan	Lebaran/ Hari	Lebaran/ Hari	Siang	Sore	Malam	Siang	Malam	Pada Bulan	Malam	Malam	Malam	Malam
B. Partisipasi dan Program Kerja Negeri														
1.	Siang Negeri yang dilaksanakan di lapangan	11.471	0.214	7.840	14.227	11.416	11.416	11.416	11.416	11.416	11.416	11.416	11.416	11.416
2.	Siang Negeri yang diadakan	0.481	0.218	3.227	11.229	0.708	0.708	0.708	0.708	0.708	0.708	0.708	0.708	0.708
3.	Siang Negeri yang dilaksanakan oleh instansi lain	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.	Siang Negeri yang dilaksanakan	3.339	2.275	1.537	2.561	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706
MELAKUKAKAN														
No	(Fungsi)	Lebaran/ Bulan	Lebaran/ Hari	Lebaran/ Hari	Siang	Sore	Malam	Siang	Malam	Pada Bulan	Malam	Malam	Malam	Malam
1.	Siang Negeri yang dilaksanakan	1.495	0.211	1.061	11.419	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219
2.	Siang Negeri yang diadakan	106	626	104	230	110	110	110	110	110	110	110	110	110
3.	Siang Negeri yang dilaksanakan oleh instansi lain	0.481	0.218	0.217	11.229	0.708	0.708	0.708	0.708	0.708	0.708	0.708	0.708	0.708
4.	Siang Negeri yang dilaksanakan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.	Siang Negeri yang dilaksanakan	13	16	11	22	19	19	19	19	19	19	19	19	19
6.	Siang Negeri yang dilaksanakan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



No	Nama	Jabatan	Tempat
1.	UPTD KOTA	Kota	Kota
2.	KORPORASI	Korporasi	Korporasi
3.	WILAYAH	Wilayah	Wilayah
4.	KEPADA	Kepada	Kepada

No	Nama	Tempat
1.	UPTD KOTA	Kota
2.	KORPORASI	Korporasi
3.	WILAYAH	Wilayah
4.	KEPADA	Kepada

No	URAIAN	REKONSTRUKSI										
		Jumlah Pembelian	Klasifikasi	Estimasi	Sal. Anggr	Kasus Bahagi	Revisi Rencana	Prinsip	Revisi Rencana	Prinsip	Revisi Rencana	Jumlah Rencana
A. Data Peralatan												
1	1.00-Mali Bundel Kabel Data Network Diklat Pusat (7700) (K. P. 1. 1)	22.000	1.011	6.250	1.070	1.984	1.022	1.382	1.790	1.261	3.281	22.000
		29.782	3.293	5.527	1.036	2.460	1.034	1.049	1.016	1.210	2.210	29.822
		198.000	6.270	18.100	2.017	4.844	3.008	2.011	3.441	4.201	6.201	197.000
2	1.00-Mali Bundel Kabel Data Network Diklat Pusat (7700) (K. P. 1. 1)	41.000	2.000	3.200	1.010	1.010	1.000	1.000	1.000	1.010	1.010	41.000
		60.000	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.010	60.000
		86.000	4.000	8.000	1.010	1.010	1.000	1.000	1.000	1.010	1.010	86.000
3	1.00-Mali Bundel Kabel Data Network Diklat Pusat (7700) (K. P. 1. 1)	17.410	800	100	240	410	400	220	300	100	100	17.410
		13.200	800	100	410	400	400	200	200	100	100	13.200
		24.200	1.200	1.200	280	800	800	400	500	200	200	24.200
Jumlah (Total) 1.00-1000		30	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30

TAMBA TANGKAS ANGGOTA KOPERASI DAN PERUSAHAAN PEMERINTAH KABUPATEN PATAN ACEH SELATAN

EMERUS TANGKAS ANGGOTA KOPERASI DAN PERUSAHAAN PEMERINTAH KABUPATEN PATAN ACEH SELATAN

1 / 1 / 2013

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah dan Persentase			Jumlah dan Persentase			Jumlah dan Persentase			Jumlah dan Persentase		
		Orang	Persentase	Orang	Orang	Persentase	Orang	Persentase	Orang	Persentase	Orang	Persentase	
B. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas													
1	Latihan Keterampilan dan Kelembagaan	122,364	6,510	3,301	2,482	4,126	2,856	1,480	1,180	4,719	1,516,608		
2	Latihan Keterampilan dan Kelembagaan	86,490	4,562	6,096	2,738	4,110	3,229	2,221	2,962	2,991	115,142		
3	Latihan Keterampilan dan Kelembagaan	122		17		19		16	6		189		
4	Latihan Keterampilan dan Kelembagaan	18,717	1,009	1,087	96,7	1,828	1,628	851	723	1,424	262,212		
C. KEGIATAN													
KELOMPOK													
Jumlah		42,000	4,379	6,702	2,008	2,962	2,871	2,226	2,267	1,139	311,282		
Jumlah		2,000	144	203	63	176	124	97	109	112	3,982		
Jumlah		86,000	6,800	6,879	2,704	4,222	3,927	2,243	2,962	2,871	115,146		
Jumlah		364	18	23	9	19	11	13	11	15	198		
Jumlah		172	7	17	7	19	7	11	16	6	240		
Jumlah		89	4	8	1	6	1	1	1	1	119		
KELOMPOK													
Jumlah		42,000	4,379	6,702	2,008	2,962	2,871	2,226	2,267	1,139	311,282		
Jumlah		2,000	144	203	63	176	124	97	109	112	3,982		
Jumlah		86,000	6,800	6,879	2,704	4,222	3,927	2,243	2,962	2,871	115,146		
Jumlah		364	18	23	9	19	11	13	11	15	198		
Jumlah		172	7	17	7	19	7	11	16	6	240		
Jumlah		89	4	8	1	6	1	1	1	1	119		

KEMERDEKAAN		KEMERDEKAAN		KEMERDEKAAN		KEMERDEKAAN	
No	Nama	Alamat	Alamat	Alamat	Alamat	Alamat	Alamat
1	111-06, Jember, JI						
2	111-06, Jember, JI						
3	111-06, Jember, JI						
4	111-06, Jember, JI						

KEMERDEKAAN		KEMERDEKAAN		KEMERDEKAAN	
No	Nama	Alamat	Alamat	Alamat	Alamat
1	111-06, Jember, JI				
2	111-06, Jember, JI				
3	111-06, Jember, JI				
4	111-06, Jember, JI				

RIWAYAT PENULIS



Dahlia Sukma, S.IP., lahir di Krueng Batee tanggal 11 November 1996 yang merupakan alumni Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Seorang yang cerdas dan aktif semasa di lingkungan kampus. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 03 Asahan Cut (2008), SMP N 1 Kluet Utara (2011), SMA Negeri 1 Kluet Utara (2014), S1 Ilmu Politik Fisip Universitas Malikussaleh (2018).

Dara cantik asal Aceh Selatan ini merupakan anak Ke-2 dari 4 bersaudara pasangan orang tua Bapak Zuwardi Sd. Dan Ibu hayaton Wardani

•



Bobby Rahman lahir di Lhokseumawe tanggal 3 September 1984 yang merupakan seorang akademisi yang humble terhadap mahasiswa dalam menerapkan suasana Akademik di ruang kelas. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Swasta Muhammadiyah 6 Lhokseumawe (1996), SLTP Swasta Muhammadiyah 3 Lhokseumawe (1999), SMA Negeri 1 Sewon Yogyakarta (2002), S1 Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Malikussaleh (2007), S2 Administrasi Publik Universitas Padjajaran (2011). Saat ini aktif sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Malikussaleh dan Dosen tamu pada beberapa perguruan tinggi di Lhokseumawe.

Bapak dosen yang humanis dan tegas ini selalu memberikan sumbangsih keilmuannya dalam bidang Ilmu social dan juga fokus terhadap kajian Kebijakan Publik dan Birokrasi. Riwayat jabatan yang pernah digeluti yaitu pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Ketua Mutu Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unimal, Ketua Mutu Program Magister Administrasi Negara, dan saat ini sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Beliau saat ini menjabat sebagai Koordinator Wilayah I Sumatera Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL), terlibat pada kepengurusan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Lhokseumawe. Aktif sebagai penulis dan pembicara pada beberapa forum diskusi dan konferensi.

Beberapa karya tulis yang pernah dipublikasikan dalam bentuk buku ber- ISBN diantaranya : Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor : Kajian Implementasi dan Dampaknya di Aceh Utara (ISBN: 978-602-1373-08-8); Perizinan Terpadu (ISBN: 978-602-1373-84-2); dan Determinasi Kemiskinan di Aceh (ISBN: 978-602-464-025-5). Penelitian yang dipublikasi: Kebijakan Pemerintah

Dalam Membangun Break Water (Tanggul Pemecah Ombak) (Studi di Kota Lhokseumawe);

Jurnal yang terpublikasi : Pembangunan Berwawasan Budaya – Jurnal SUWA Tahun 2009; Remunerasi Berbasis Kinerja – Jurnal Suwa Tahun 2010); Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara – Jurnal Transformasi Administrasi PKP2A IV LAN Tahun 2012; Mengukur Tingkat Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Aceh Utara – Jurnal SUWA Tahun 2013; Sosialisasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG (Studi di Meunasah Keude Geudong Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara) - Jurnal MANTEKH Tahun 2014; Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Akuntabilitas Publik – Jurnal SUWA Tahun 2014; Pro Kontra Rancangan Peraturan Daerah Lhokseumawe Tentang Larangan Duduk Secara Mengangkang Bagi Perempuan di Sepeda Motor – JIPSI Unikom Bandung Tahun 2014; Pentingnya Administrasi Publik Dalam Pembangunan – JAKTABANGUN Tahun 2015; Etika Politik Pejabat Publik di Indonesia – JPI Tahun 2015; Analisis Kondisi Motivasi Pegawai di Lingkungan Dinas Kebersihan Kota Lhoseumawe Dengan Menggunakan Teori Empat-Dorongan (JAKTABANGUN Tahun 2016; Standar Layanan Program BPJS Kesehatan – JPP Tahun 2016; Peran Ulama Dalam Resolusi Konflik Partai Lokal (Studi di MPU Kabupaten Bireun – JPP Tahun 2016; Perilaku Pemilih Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 (Studi Partai Lokal Kota Lhokseumawe) – JPP Tahun 2016; Analisis Sektor Unggulan di Aceh Utara dan Aceh Timur – JAKTABANGUN Tahun 2016; Dampak Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara – Jaktabangun Tahun 2016; Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara – JAKTABANGUN Tahun 2016; Pemikiran Politik Nur Cholis Madjid Tentang Agama dan Negara – JPP Tahun 2017; Resposibilitas Dinas Sosial dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Lhokseumawe – JPP Tahun 2017; Pengaruh Pengawasan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajemen Rumah Sakit Umum Sakinah Kota Lhokseumawe – JAKTABANGUN Tahun 2017; Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe – JAKTABANGUN Tahun 2017; Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap

Peningkatan Kinerja Pengelolaan Pajak Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe; Analisis Perbedaan PAD Kabupaten Aceh Utara Sebelum dan Setelah Pemekaran Dengan Kota Lhokseumawe – JAKTABANGUN Tahun 2017; Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara (Survei Pada Desa Di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara) – JAKTABANGUN Tahun 2017;

Prosiding : Kondisi Politik Aceh dan Dampaknya pada Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara) – disampaikan pada Seminar Nasional dan Call for Paper di Kampus Unikom Bandung Tahun 2017.

•

RIWAYAT EDITOR



Teuku Muzaffarsyah dilahirkan di Langsa, tanggal 09 Januari 1979. Kiprah dosen yang cool dan dekat dengan Mahasiswa ini memiliki kajian keilmuan yang spesifik dibidang Ilmu Pemerintahan dan Politik. Riwayat pendidikan beliau SD Negeri 6 Langsa, SMP Negeri 1 Langsa, SMA Negeri 1 Langsa, dan SMA Negeri 6 Yogyakarta tahun 1997 selanjutnya menyelesaikan S1 Ilmu Pemerintahan Fisipol di Universitas Gadjah Mada, S2 Administrasi Publik di Universitas Malikussaleh. Saat ini aktif sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Malikussaleh dan dipercaya menjabat sebagai Sekretaris pada Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Malikussaleh.

Pak Pon panggilan akrab beliau oleh Mahasiswa ini pada tahun 2009 pernah mengikuti Program *Overseas Non Degree Training* bidang Public Management di University Kebangsaan Malaysia, menjadi Penceramah pada Seminar Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi di Fakultas Sains Sosial Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (2009), dan mengikuti Konvensyen Berakhirnya Agenda Zionis di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) (2009). Selain itu beliau pernah menjadi Tim Penyusun Naskah Ujian Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Anggota Ad-Hoc (KIP) Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2018.

Karya Ilmiah yang dipublikasikan diantaranya: Keterwakilan Perempuan di DPRK Subussalam Tahun 2014 dalam Jurnal Politik dan Pemerintahan Universitas Malikussaleh (2016),

•

Dapat dilihat pada partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 di kabupaten aceh selatan merupakan kajian penelitian untuk meneliti bagaimana partisipasi politik masyarakat serta tujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis (analisa mendalam) dan tidak menggunakan hasil uji statistik namun lebih mengandalkan pada hasil interpretasi terhadap makna-makna setiap fenomena yang penulis dapat kan di lapangan pada saat penelitian. Sedangkan teknik pengambilan data hanya dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Dari hari penelitian menunjukkan bahwa , pada pemilihan kepala daerah di kabupaten aceh selatan tahun 2013 itu tingkat partisipasi politik masyarakatnya semakin meningkat setiap pemilihan nya walaupun belum menyuluruh. Dengan partisipasi masyarakat yang sanag tinggi dalam melakukan pencontrengan di TPS-TPS yang merupakan tempat pemungutan suara dalam proses demokrasinya. Tinggi nya partisipasi tersebut masyarakat sudah sebagian melibatkan diri dalam politik dengan adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri tanpa ada hal-hal yang menginterpensi mereka dalam melakukan pencontrengan pada saat pemilihan berlangsung. Walaupun juga ada beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak ingin menggunakan hak pilih nya baik karena dipengaruhi oleh lingkungan maupun ekonomi yang menjadi prioritas mereka. serta masyarakat yang memang sudah tidak ingin mngetahui apapun mengenai politik, dikarenakan sudah malas dalam mendengarkan janji-janji yang tak kunjung terealisasi setiap pergantian kepala daerahnya. Pada pemilukada tahun 2013 tersebut jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih nya sampai 111.233 jiwa. Namun pada pilkada tahun ini semoga dapat melebihi dari pemilih sebelumnya. Namun dapat dikatakan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat berarti para penyelenggara pemilu sudah bekerjasama dengan baik Walaupun belum sesuai dengan harapan terutama KIP (komis independen pemilihan).



UNIMAL PRESS

ISBN 978-602-464-051-4



9 786024 640514